

Pengaruh Good Corporate Governance, Pertumbuhan Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility



Yaumil Khoiriyah¹, Refysha Syafilia Wirawan²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Lampung, Indonesia

¹yaumil@darmajaya.ac.id, ²refyshawirawan@gmail.com

INFO ARTIKEL

Tanggal revisi: 1
9 Januari 2021

Tanggal diterima:
27 Januari 2021

Tanggal diterbitkan online:
28 Januari 2021

Kata Kunci:

*Corporate Social
Responsibility, Company
Growth, Good Corporate
Governance, Environment
Performance*

ABSTRAK

The purpose of this study was to obtain empirical evidence regarding the effect of Good Corporate Governance, company growth, and environment performance towards corporate social responsibility of registered manufacturing companies on the Indonesia Stock Exchange in 2016- 2018. The population of this study was the registered manufacturing companies on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2016-2018. The technique of selecting samples was purposive sampling. Therefore, the sample was 38 manufacturing companies. The method of analysis uses descriptive statistical analysis methods. The results of this study proved that managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership, and company growth did not affect on corporate social responsibility. Furthermore, the Audit Committee, board of commissioners, and environment performance affected on corporate social responsibility.

1. PENDAHULUAN

Sudah cukup banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menjalankan kewajiban sosialnya dengan baik, walaupun masih banyak juga ditemukan perusahaan-perusahaan yang belum memperhatikan kewajiban sosialnya. Hal ini sesuai dengan teori menurut (Mardi et al, 2019) segala macam kegiatan pertanggungjawaban sosial lingkungan pada perusahaan umumnya berdampak pada pengeluaran, akan berdampak mengurangi keuntungan perusahaan.

Perusahaan tidak hanya fokus pada *single bottom line* yaitu aspek ekonomi yang difokuskan pada kondisi finansial saja, namun juga harus memerhatikan aspek sosial dan lingkungannya (Effendi, 2016). Ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah dua pihak yang saling memberi dan membutuhkan. Apabila perusahaan mampu mengimplementasikan *Triple Bottom Line* dengan baik, maka nilai perusahaan akan terlihat baik pula, pertanggungjawaban CSR akan terlihat di dalam *Annual Report* (Laporan Tahunan) perusahaan, apabila *Stakeholder* telah melihat baiknya perusahaan mementingkan aspek sosialnya, maka tak ragu pula *Stakeholder* akan berinvestasi besar dalam perusahaan tersebut. Keluarnya konsep CSR membuat para stakeholder menyadari sudah banyak lingkungan yang rusak akibat dari tidak tanggung jawabnya perusahaan atas kesehatan lingkungan, membuat perusahaan mendapat tekanan dari para stakeholder untuk dapat efektif menjalankan kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan dan transparansi dalam pengungkapan laporan tahunan. Terdapat dalam pasal 66 ayat 2c yang menyatakan bahwa perusahaan harus mengeluarkan laporan tahunan yang besertakan laporan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan yang lebih detailnya akan diperjelas pada Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan bagi perusahaan perseroan wajib mengungkapkan laporan CSR di dalam laporan tahunan, akan tetapi masih belum ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang teknis pengungkapan CSR. Belum diaturnya tata cara pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan oleh pemerintah Indonesia, memberikan dampak perbedaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari setiap perusahaan. Perbedaan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari tiap perusahaan menyebabkan terjadinya asimetri informasi (Wahyu, 2016). Asimetri Informasi perlu diberikan pengawasan dan pengendalian oleh pemilik saham dan dewan komisaris. Pengendalian dan pengawasan perusahaan dikenal dengan *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan.

Sistem dalam menjalankan *Corporate Governance* adalah dengan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *Stakeholder* telah dilindungi (Said *et al*

Pengaruh Good Corporate Governance, Pertumbuhan Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility

al, 2009). *Good Corporate Governance* di Indonesia dapat diartikan sebagai cara pengendalian perusahaan yang baik. Dua hal yang difokuskan *corporate governance* yaitu, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kemudian, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Setiap perusahaan di Indonesia memang sudah sadar akan melakukan pengungkapan laporan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan di dalam laporan tahunannya, namun tidak semua bisa menjalankan *social responsibility* dengan baik juga. Masih begitu banyak perusahaan yang terkait kasus terkait sosial dan lingkungannya. Fenomena inilah yang menjadikan asimetri informasi dari setiap perusahaan yang melakukan pengungkapan dengan standar yang berbeda-beda.

Penelitian ini adalah replikasi penelitian yang dilakukan (Sukasih dan Sugiyanto, 2017). Penelitian (Sukasih dan Sugiyanto, 2017) menganalisis hubungan antara struktur *Good Corporate Governance* serta kinerja lingkungan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Good Corporate Governance* diwakili oleh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran dewan komisaris, dan variabel kinerja lingkungan itu sendiri. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menambahkan *Good Corporate Governance* dengan proksi kepemilikan asing, dan juga variabel pertumbuhan perusahaan. Peneliti menambahkan beberapa variabel seperti proksi kepemilikan asing, dan pertumbuhan perusahaan berdasarkan penelitian (Sunreni, 2018) dan (Effendi dan Hapsari, 2015) dengan alasan bahwa, secara teori kepemilikan asing menurut (Simerly & Li, dalam Machmud dan Jack, 2008) bahwa merupakan pihak yang dianggap *concern* dan lebih mengenal mengenai konsep *Corporate Social Responsibility*. Negara-negara Eropa dan Amerika merupakan negara yang sangat memperhatikan isu sosial, sebagai contoh, *New York Stock Exchange* memiliki *Dow Jones Sustainability Index* (DJSI) bagi saham-saham perusahaan yang dikategorikan memiliki nilai *corporate sustainability* dengan salah satu kriterianya adalah praktik CSR. Begitu pula *London Stock Exchange* yang memiliki *Socially Responsible Investment (SRI) Index* dan *Financial Times Stock Exchange* (FTSE) yang memiliki FTSE4Good sejak 2001. sehingga penulis merasa hal ini perlu untuk diteliti. Penambahan variabel pertumbuhan perusahaan, karena

Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu faktor pertimbangan yang dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasinya (Indraswari dan Mimba, 2017). pertumbuhan perusahaan merupakan gambaran kekuatan perusahaan untuk bertahan hidup. Dengan terjaminnya kegiatan ekonomi perusahaan maka sesuai harapan para *stakeholder*, perusahaan akan meningkatkan perhatian terhadap aktivitas sosial lingkungannya. Perusahaan akan melakukan pengungkapan lebih terkait dengan aktivitas serta kebijakan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan (Lucyanda dan Siagian, 2012).

Penelitian mengenai aktivitas *Corporate Social Responsibility* sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa variabel yang digunakan para peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Dalam variabel *Corporate Governance*, proksi-proksi komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing memiliki hasil yang berbeda pada tiap peneliti. Dalam penelitian (Rivandi, dan Putra, 2019) menunjukkan hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*, sedangkan dalam penelitian (Sukasih dan Sugiyanto, 2017) komite audit menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*. Dalam variabel kepemilikan institusional penelitian (Siregar, 2016) tidak memiliki pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*, sedangkan dalam (Sukasih dan Sugiyanto, 2017) kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Kemudian variabel kepemilikan asing dalam penelitian (Siregar, 2016) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Corporate Social Responsibility*, sedangkan dalam penelitian (Permataloka, 2016) kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Legitimacy Theory

GCG ialah sebuah sistem, proses dan struktur di dalam sebuah perusahaan yang digunakan dalam pengelolaannya. GCG digunakan untuk menaikkan nilai dari perusahaan untuk lima tahun ke depan atau lebih, (Hamdani, 2016:27 dan Tunggal, 2013:149). KNKG menyebutkan penerapan GCG sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang ada, hal ini dikarenakan GCG dapat menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Menurut KNKG pengelolaan yang baik merupakan pilar dari sistem ekonomi pasar, penerapannya harus

bersifat sistematis dan juga berkesinambungan (KNKG, 2006). Teori legitimasi adalah aktivitas yang dijalankan perusahaan untuk tidak melanggar norma-norma masyarakat yang berlaku.

Teori Legitimasi dapat dianggap sebagai hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Dowling dan Pfeffer, 1975) dalam (Ghozali dan Chariri, 2008). Menurut (Deegan, 2000), teori legitimasi memercayai suatu opini bahwa terdapat “kontrak” antara organisasi dengan lingkungan di mana organisasi tersebut beroperasi. Konsep “kontrak sosial” digunakan untuk menunjukkan harapan masyarakat tentang cara yang seharusnya dilakukan organisasi dalam melakukan aktivitas. Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan yang penting terhadap praktik pengungkapan sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi legitimasi. Sebagai misal, kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif.

(Ghozali dan Chariri, 2008) menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan perusahaan dapat memberikan dampak pada sosial dan lingkungan sekitar, sehingga perusahaan menggunakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan tahunan agar menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan dalam menjaga sosial dan lingkungan perusahaan. Hal itu menjelaskan bahwa legitimasi perusahaan dapat ditingkatkan melalui *Corporate Social Responsibility*.

Corporate Social Responsibility

(Tanudjaja, 2006) mengartikan *Corporate Social Responsibility* sebagai komitmen industri untuk mempertanggung jawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya. (Darwin, 2008) mendefinisikan CSR sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*,

yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Oleh karena itu, perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Di Indonesia pengungkapan CSR telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2014, secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial, yang berisikan bahwa, entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup, dan laporan nilai tambah (*Value added statement*), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2014)

Pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan dapat dilakukan perusahaan dengan cara menyajikannya didalam laporan tahunan. Hal ini dimaksudkan agar otoritas, investor, kreditor, dan *stakeholder* lainnya dapat mengetahui secara pasti tentang komitmen dan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan dan bagaimana kinerja keuangan (laba) perusahaan pasca dimasukkan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Lako, 2011). (Lako, 2011) juga menjelaskan di dalam bukunya bahwa, Perusahaan juga perlu mengungkapkan secara rinci tentang aksi-aksi dan pengorbanan aset-aset ekonomi yang telah dilakukan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalamnya.

Pengungkapan tambahan tersebut hendaknya memaparkan tentang strategi, kebijakan dan tindakan-tindakan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan manajemen dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya secara berkelanjutan. Hal ini memberikan manfaat *stakeholders* akan memberikan apresiasi dan tidak akan memberikan respon negatif meskipun kinerja laba yang dilaporkan akan menurun pasca dimasukkannya biaya TJSL. *Stakeholders* akan memberikan apresiasi secara positif karena tahu bahwa perusahaan memiliki komitmen yang tinggi terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Meskipun dalam jangka pendek perusahaan akan menderita penurunan kinerja laba, namun dalam jangka menengah dan panjang perusahaan justru akan meraih keuntungan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan pengorbanan aset-aset ekonomi untuk biaya TJSL memiliki dua sifat unik yaitu, di satu sisi sebagai pengeluaran beban (*expenses*) yang

mengakibatkan kinerja laba menurun, namun di sisi lain adalah sebagai pengeluaran investasi yang akan meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Sejumlah riset di Australia, Selandia Baru dan Inggris memberikan bukti yang memperkuat optimisme tersebut. Dilaporkan bahwa perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang ramah lingkungan secara berkelanjutan cenderung memiliki kinerja keuangan dan kinerja nilai pasar (*market value*) jauh lebih baik dibanding perusahaan-perusahaan yang menyajikan laporan keuangan secara konvensional (Lako, 2007).

Corporate Social Responsibility (CSR) bertujuan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. pemahaman CSR ini dapat dijalankan melalui 3 pilar penting, yaitu *profit, people, planet* (3P).

Good Corporate Governance

Dalam (Daniri, 2014) tidak ada definisi tunggal untuk tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance*. Dalam bukunya, (Rahardjo, 2018) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan salah satu bentuk implementasi bisnis beretika. Tata kelola yang baik akan menghasilkan keputusan yang berintegritas. Berdasarkan penjelasan (Rahardjo, 2018), tuntutan untuk menata kembali tata kelola perusahaan menjadi semakin gencar. Walaupun objek penataan kembali tata kelola adalah perusahaan dan profesi akuntan publik, tetapi banyak institusi yang terlibat di dalamnya. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) menurut (Agoes, 2011) tata kelola yang baik adalah sebagai sistem yang mengatur hubungan antara peran Dewan Komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. *Good Corporate Governance* (GCG/ Tata Kelola Perusahaan yang Baik) adalah unsur utama yang dipertimbangkan oleh investor saat ia memilih sekian banyak perusahaan untuk berinvestasi. Hal ini karena, sebuah perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dipimpin oleh para eksekutif yang jujur dan berpengalaman dan memiliki kemampuan organisasi yang mumpuni. Sehingga menumbuhkan keyakinan di hati para investor untuk memilih perusahaan tersebut sebagai tempat menanamkan uangnya. *Good Corporate Governance* terdiri dari beberapa hal yang saling terkait satu sama lain, yaitu diantaranya adalah sistem yang diterapkan dalam praktik yang jujur, bisnis yang kokoh dan memiliki pemimpin yang

baik berpadu dengan sistem operasional organisasi yang kompak sehingga mampu berjalan dengan baik.

Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengenai Komite Audit adalah Suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit. Pengertian Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Menurut (Anisah, 2018) Komite audit merupakan pihak yang mendukung dalam menjalankan tugas dan kewajiban dewan komisaris. Dalam melaksanakan wewenangnya, komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Bursa Efek Indonesia. Umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan (Arents, 2010). Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016).

Tanggung jawab komite audit meliputi *review* departemen audit internal, mengulas rencana audit tahunan, meninjau laporan keuangan triwulan dan akhir tahun, berfokus pada perubahan kebijakan dan praktik akuntansi, penyesuaian signifikan standar akuntansi dan peraturan hukum lainnya membuat pengawasan komite audit terhadap aktivitas perusahaan

sangat ketat termasuk aktivitas CSR dan pengungkapannya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Siregar, 2016) bahwa, komite audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

H₁ : Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Dewan Komisaris

Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* mendefinisikan Dewan Komisaris sebagai merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. KNKG (2006) mendefinisikan Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi dalam perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Peranan Dewan Komisaris dengan Pengungkapan CSR Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau pihak manajemen. Dalam hal ini, dewan komisaris memiliki kekuasaan terhadap manajemen untuk memberikan pengaruh agar manajemen mengungkapkan CSR (Fahrizqi, 2010). Tugas lain dari Dewan Komisaris adalah melakukan *oversight* atas ketaatan perusahaan kepada undang-undang dan peraturan dan bahwa perusahaan berperilaku etis dan bermoral (Muntoro, 2007). Pernyataan ini dapat menjadi faktor keterlibatan Dewan Komisaris terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, didasarkan pada ketaatan pelaksanaa UU No 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” Bab V pasal 74.

Dewan komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006). Pengukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan

semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitor yang dilakukan akan semakin efektif (Sembiring, 2005).

H₂ : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham yang berarti sebagai pemilik dalam suatu perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan sebuah keputusan di perusahaan yang bersangkutan (Nurfadilah & Sagara, 2015). Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial.

Konflik yang disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau *agency conflict*. Kondisi tersebut di atas akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene nya adalah mereka sendiri.

H₃ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional dapat diartikan sebagai proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga seperti perbankan, asuransi, dan institusi lain. Penyebab kinerja manajer diawasi secara optimal itu karena adanya peningkatan kepemilikan institusional, maka akan terhindar dari perilaku oportunistik. Kepemilikan

institusional adalah suatu kepemilikan di mana institusi yang memiliki saham-saham di perusahaan lainnya. Kepemilikan institusional itu memiliki peranan yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara investor dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Dalam hubungannya dengan fungsi *monitoring*, investor institusional diyakini memiliki kemampuan untuk *memonitoring* tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual.

Kepemilikan institusional mewakili suatu sumber kekuasaan (*source of power*) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan, nantinya akan bisa dilihat dari kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut (Laksmitaningrum dan purwanto, 2013) Kepemilikan institusional yang besar akan sangat berpengaruh dan berdampak pada keputusan manajemen yang akan diambil. Salah satu keputusannya adalah pengungkapan informasi CSR.

H₄ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah persentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Perusahaan multinasional atau kepemilikan asing melihat keuntungan legitimasi berasal dari para *stakeholder*, di mana secara tipikal berdasarkan *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Barkemeyer, 2007). Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Perusahaan yang dimiliki oleh asing cenderung lebih ketat dalam pengawasan operasional perusahaannya. Hal ini dikarenakan investor asing menuntut kerja keras agar investasi yang mereka lakukan dapat memberikan pengembalian yang besar pula. Pemilik asing mungkin memiliki informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaannya.

Hal ini dapat mendorong para manajer untuk dapat lebih mementingkan kepentingan para pemegang sahamnya.

Bukti empiris pernyataan tersebut dinyatakan oleh (Fauzi, 2008). (Fauzi, 2008) menyatakan bahwa aspek lingkungan, pencapaian perusahaan multinasional yang berada di Indonesia lebih baik daripada perusahaan nasional. Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung lebih mengungkapkan CSR yang lebih besar karena kepedulian yang besar untuk mendanai kegiatan sosial dan lingkungan.

H₅ : Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan merupakan bagaimana kemampuan dari perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan ukuran perusahaan. Pertumbuhan (*growth*) adalah seberapa jauh perusahaan itu mampu menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang sama (Machfoedz, 2007). Perusahaan sangat dibutuhkan dan diharapkan oleh pihak internal serta pihak eksternal bagi perusahaan, karena pertumbuhan yang baik memberi tanda baik pula bagi perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang *Stakeholder*, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan *Stakeholder* pun akan mengharapkan tingkat pengembalian (*rate of return*) dari investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik (Purba, 2017). Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan perusahaan yang cepat harus lebih banyak mengandalkan pada pemasukan dari pihak luar. Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan ekspansi atau perluasan perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh Joni dan Lina (2010) yang berpendapat bahwa pertumbuhan perusahaan pada dasarnya menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan dana yang ia miliki untuk kegiatan operasi dan investasi. Peningkatan jumlah aset, baik aset lancar maupun aset jangka panjang membutuhkan dana, dengan alternatif pendanaan internal atau dengan pendanaan eksternal. Berdasarkan *pecking order theory*, perusahaan akan cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan dana eksternal (hutang). Ketika perusahaan melakukan investasi dalam jumlah yang tinggi sehingga

melebihi jumlah laba ditahan, maka akan terjadi peningkatan hutang. Asumsinya adalah ketika aset perusahaan meningkat sedangkan faktor lain dianggap *ceteris paribus*, maka peningkatan aset akan menyebabkan peningkatan hutang (Hestaningrum, 2012).

H₆: Tingkat Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan kinerja suatu perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Kinerja lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan pengakuan dan integrasi dampak isu-isu lingkungan pada sistem akuntansi tradisional suatu perusahaan (Halim dan Irawan, 1998). Kinerja lingkungan merupakan kinerja suatu perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Kinerja lingkungan dapat dilakukan dengan menerapkan akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan pengakuan dan integrasi dampak isu-isu lingkungan pada sistem akuntansi tradisional suatu perusahaan (Halim dan Irawan, 1998 dalam Fitriyani, 2012).

Di Indonesia, mengukur kinerja lingkungan menggunakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan pekerjaan (PROPER) yang di program langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan lingkungan sekitar perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup. PROPER diumumkan secara rutin kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan mendapat insentif maupun desinsentif reputasi, tergantung pada tingkat ketaatannya (Pujiasih, 2013). PROPER memberikan tingkatan perusahaan berdasarkan warna, dimulai dari warna terbaik EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH, dan HITAM. Dengan penilaian PROPER masyarakat akan mudah menilai perusahaan-perusahaan tersebut mampu atau tidaknya dalam mengimplementasikan kinerja lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerapkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).

Program ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R (*reuse, reduce, recycle*), efisiensi energi, Pengaruh Good Corporate Governance, Pertumbuhan Perusahaan, dan Kinerja Lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility

konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggungjawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat.

H₇ : Tingkat Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari situs resmi www.idx.co.id. Peneliti akan mengumpulkan data melalui :

1. Pengumpulan data sekunder

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh melalui laman www.idx.co.id yaitu berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2016-2018, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta menelaah data sekunder yang berhubungan dengan penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian. Kegunaan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori yang digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa masalah yang diteliti sebagai pedoman untuk melakukan studi dalam melakukan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan *Corporate Social Responsibility* Tahun 2016-2018 bidang manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metode pemilihan sampel menggunakan Metode *Purposive Sampling*, yaitu metode pemilihan sampel secara tidak acak yang untuk mendapatkan informasinya harus dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun Periode 2016-2018.
2. Perusahaan Manufaktur yang tidak Delisting di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018
3. Perusahaan Manufaktur yang mengungkapkan laporan tahunan secara lengkap berturut-turut selama 2016-2018.
4. Perusahaan Manufaktur yang telah mengikuti PROPER berturut-turut selama tahun 2016-2018.
5. Perusahaan Manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (Rp) pada *website* Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018.
6. Perusahaan Manufaktur yang memenuhi kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian selama periode tahun 2016-2018.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data yakni analisis statistik deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2013) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji *adjusted R Squared* dan uji parsial (t test). Analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Dalam hal ini perlu diketahui pengaruh dari variabel independen (Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, Dewan Komisaris, Pertumbuhan Perusahaan, dan Kinerja Keuangan) terhadap variabel dependen (Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*).

Model dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta_1 X_1 KMA + \beta_2 X_2 DK + \beta_3 X_3 KM + \beta_4 X_4 KI + \beta_5 X_5 KA + \beta_6 X_6 PP + \beta_7 X_7 KL + e$$

Keterangan :

- y : *Corporate Social Responsibility Disclosure*
 α : konstanta persamaan regresi
 β : koefisien regresi
 X_1 : Komite Audit
 X_2 : Dewan Komisaris
 X_3 : Kepemilikan Manajerial
 X_4 : Kepemilikan Institusional
 X_5 : Kepemilikan Asing
 X_6 : Pertumbuhan Perusahaan
 X_7 : Kinerja Lingkungan
 e : *Error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif Statistik

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapat dari [website www.idx.com](http://www.idx.com) berupa data pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan manufaktur tahun 2016-2018. Statistik deskriptif dari variabel sampel perusahaan manufaktur selama periode 2016-2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KOMITE AUDIT	114	2	5	3,10	,460
DEWAN KOMISARIS	114	2	12	5,17	1,886
KEPEMILIKAN MANAJERIAL	114	.000	.810	.03746	.100769
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	114	.000	.999	.82581	.180824
KEPEMILIKAN ASING	114	.000	.963	.40841	.371413
PERTUMBUHAN PERUSAHAAN	114	-8.720	7.828	.10596	1.455081
KINERJA LINGKUNGAN	114	2	5	3,12	,500
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	114	.143	.692	.36820	.150995
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Data Diolah

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas diketahui bahwa variabel Komite Audit memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,922 dan nilai VIF sebesar 1,085. Sedangkan variabel Dewan Komisaris memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,749 dengan nilai VIF sebesar 1,335, kemudian variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai *tolerance* 0,564 dan VIF sebesar 1,773, untuk Kepemilikan Instiusional nilai *tolerance* sebesar 0,518 dengan VIF sebesar 1,929, Kepemilikan Asing memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,718 dan nilai VIF sebesar 1,392. Kemudian variabel Pertumbuhan Perusahaan memiliki nilai *tolerance* 0,978 dengan nilai VIF 1,023 dan variabel terakhir Kinerja Lingkungan memiliki nilai *tolerance* 0,878 dengan nilai VIF sebesar 1,139. Dari hasil tersebut diperoleh kesimpulan bahwa seluruh nilai VIF dalam semua variabel penelitian lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi.

Tabel 2. Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,011	,119		,095	,925		
KOMITE AUDIT	-,061	,026	-,186	2,355	,020	,922	1,085
DEWAN KOMISARIS	,031	,007	,382	4,353	,000	,749	1,335
KEPEMILIKAN MANAJERIAL	,009	,152	,006	,062	,951	,564	1,773
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	,080	,088	,095	,905	,368	,518	1,929
KEPEMILIKAN ASING	,035	,036	,086	,965	,337	,718	1,392
PERTUMBUHAN PERUSAHAAN	,005	,008	,046	,596	,552	,978	1,023
KINERJA LINGKUNGAN	,098	,024	,326	4,021	,000	,878	1,139

a. Dependent Variable: *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Sumber: Data diolah

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,011	,119		,095	,925
KOMITE AUDIT	-,061	,026	-,186	2,355	,020
DEWAN KOMISARIS	,031	,007	,382	4,353	,000
KEPEMILIKAN MANAJERIAL	,009	,152	,006	,062	,951
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	,080	,088	,095	,905	,368
KEPEMILIKAN ASING	,035	,036	,086	,965	,337
PERTUMBUHAN PERUSAHAAN	,005	,008	,046	,596	,552
KINERJA LINGKUNGAN	,098	,024	,326	4,021	,000

a. Dependent Variable: *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian regresi linier berganda penelitian ini adalah sebagai berikut;

$$y = \alpha + \beta_1 X_1 KMA + \beta_2 X_2 DK + \beta_3 X_3 KM + \beta_4 X_4 KI + \beta_5 X_5 KA + \beta_6 X_6 PP + \beta_7 X_7 KL + e$$

$$CSR = 0,011 - 0,061 KMA + 0,031 DK + 0,009 KM + 0,080 KI + 0,035 KA + 0,005 PP + 0,098 KL + e$$

Dari hasil persamaan tersebut dapat dilihat hasil regresi sebagai berikut:

- Nilai koefisien regresi Komite Audit terhadap *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,061 menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Komite Audit akan menurunkan (-) *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,061
- Nilai koefisien regresi Dewan Komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,031 menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Dewan Komisaris akan meningkatkan (+) *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,031

- c. Nilai koefisien regresi Kepemilikan Manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,009 menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Kepemilikan Manajerial akan meningkatkan (+) *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,009
- d. Nilai koefisien regresi Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,080 menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Kepemilikan Institusional akan meningkatkan (+) *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,080
- e. Nilai koefisien regresi Kepemilikan Asing terhadap *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,035 menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Kepemilikan Asing akan meningkatkan (+) *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,035
- f. Nilai koefisien regresi Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,005 menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Pertumbuhan Perusahaan akan meningkatkan (+) *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,005
- g. Nilai koefisien regresi Kinerja Lingkungan terhadap *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,098 menunjukkan bahwa setiap penurunan/peningkatan Kinerja Lingkungan akan meningkatkan (+) *Corporate Social Responsibility* sebesar 0,098

Pembahasan

Pengaruh Komite Audit terhadap *Corporate Social Responsibility*

Pengujian variabel Komite *Audit* memiliki pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Hipotesis diterima. Adanya pengaruh positif dapat diartikan bahwa semakin besar ukuran komite menerbitkan laporan yang lengkap dan berintegritas tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh McCullen (dalam Said, et al, 2009) bahwa keberadaan audit mampu menghasilkan pelaporan yang lebih berkualitas baik itu laporan *mandatory* dan *voluntary*. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, komposisi jumlah komite audit yang memadai ikut berperan. Dengan jumlah anggota komite audit yang lebih besar maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan hal ini akan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi sukarela seperti pengungkapan lingkungan secara lebih luas. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Focker (dalam Said et al., 2009) yang

menyebutkan bahwa Komite Audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan audit maka semakin banyak jumlah item pengungkapan *Corporate Social Responsibility* oleh manajemen perusahaan. Keberadaan komite audit akan mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan yang lengkap dan berintegritas tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh McCullen (dalam Said, et al, 2009) bahwa keberadaan audit mampu menghasilkan pelaporan yang lebih berkualitas baik itu laporan *mandatory* dan *voluntary*. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, komposisi jumlah komite audit yang memadai ikut berperan. Dengan jumlah anggota komite audit yang lebih besar maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan hal ini akan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan informasi sukarela seperti pengungkapan lingkungan secara lebih luas. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Focker (dalam Said et al., 2009) yang menyebutkan bahwa Komite Audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan.

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility*

Pada hasil penelitian diketahui bahwa pengujian variabel Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Hipotesis ditolak. Dalam hal ini, terlihat lemahnya Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasannya. Pengawasan dewan komisaris lebih ditujukan bagaimana direksi perusahaan mengatasi masalah tersebut sehingga dewan komisaris tidak terlalu menekankan manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR. Menurut (Fahrizqi, 2010) ditolaknya hipotesis ini karena dewan komisaris merupakan wakil *Shareholder* dalam perusahaan yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen. Sebagian wakil dari *shareholder* dewan komisaris akan membuat kebijakan menggunakan laba perusahaan untuk aktivitas operasional perusahaan yang lebih menguntungkan daripada melakukan aktivitas sosial.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility*

Penelitian variabel Kepemilikan Manajerial mendapatkan hasil bahwa tidak ada pengaruhnya terhadap *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Hipotesis ditolak. Hal ini ditunjukkan dalam hasil data yang didapatkan bahwa tidak banyak perusahaan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak manajemen, sehingga tidak banyak mempengaruhi luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini disebabkan masih terjadi adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Sehingga manajer kurang peduli terhadap *Corporate Social Responsibility* dan masih mementingkan kepentingan pribadinya dan belum fokus dengan aspek CSR. Manajer perusahaan tidak menekankan perusahaan untuk mengungkapkan CSR, sehingga besar kecilnya kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi pengungkapan CSR.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Social Responsibility*

Hasil penelitian variabel Kepemilikan Institusional menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Hipotesis ditolak. Hal ini terlihat bahwa Kepemilikan Institusional memiliki fokus untuk mencari laba yang mampu berdampak langsung pada tingkat pengembalian yang diperoleh institusi dari investasinya dalam perusahaan tersebut, dan dalam meningkatkan laba, perusahaan dituntut agar menghasilkan laba sebesar-besarnya dan perusahaan tersebut akan terdorong dalam melakukan efisiensi biaya termasuk biaya kegiatan sosialnya.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Corporate Social Responsibility*

Penelitian dalam variabel Kepemilikan Asing memiliki hasil yang menunjukkan bahwa Kepemilikan Asing tidak memiliki pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Hipotesis ditolak. Ada atau tidaknya kepemilikan yang dimiliki pihak asing tidak mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Persentase kepemilikan saham pada pihak asing dalam perusahaan manufaktur ditahun 2016-2018 cenderung lebih kecil sehingga kepemilikan asing tidak dapat mempengaruhi luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

mayoritas investor asing yang memiliki saham perusahaan tersebar di berbagai negara sehingga dalam mengawasi kinerja manajemen menjadi tidak maksimal karena para investor tidak mempunyai insentif dan kemampuan untuk mengawasi manajemen perusahaan. Investor asing tidak mampu melakukan *monitoring* dengan baik, sehingga manajemen memberikan informasi tidak sepenuhnya kepada investor asing karena manajemen mempunyai tujuan tertentu (Sari, 2010).

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility*

Variabel penelitian Pertumbuhan Perusahaan mendapatkan hasil tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu dinyatakan bahwa Hipotesis ditolak. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk meningkatkan pembiayaan aktivitas perusahaan. Dalam penelitian ini rasio yang ditunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan cenderung lebih memilih mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan untuk kegiatan produksi yang akan meningkatkan keuntungan perusahaan dibanding untuk melakukan kegiatan sosial. tersebut disebabkan *corporate social responsibility* merupakan isu baru dan kualitas tidak mudah di ukur serta kebanyakan orientasi investor lebih tertuju kepada kinerja jangka pendek atau keuntungan (*profit*), sedangkan *corporate social responsibility* berpengaruh pada jangka menengah dan panjang (Ulfa, 2009).

Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap *Corporate Social Responsibility*

Variabel Kinerja Lingkungan mendapatkan hasil berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Oleh karena itu, dinyatakan bahwa Hipotesis diterima. Hasil penelitian Kinerja Lingkungan memiliki nilai rata-rata 3,12 yang apabila dikonversikan berdasarkan skor penilaian PROPER maka perusahaan sampel berada dalam rata-rata ranking berwarna biru berkriteria baik. Perusahaan yang mendapatkan nilai rata-rata berwarna biru telah melakukan usaha untuk mengelola lingkungan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Apabila perusahaan sudah melaksanakan pengelolaan lingkungan dengan baik maka perusahaan akan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* sedetail mungkin. Kinerja lingkungan yang dinilai melalui program PROPER memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengungkapan CSR

perusahaan. Program yang diadakan oleh kementerian lingkungan hidup ini pada intinya bertujuan untuk memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk dapat meningkatkan kinerja lingkungannya. Keikutsertaan perusahaan ini saja sudah dinilai positif. Perilaku variabel kinerja lingkungan sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang baik dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja lingkungan lebih buruk. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki kepedulian sosial yang lebih besar terhadap masyarakat, lingkungan, dan tenaga kerjanya. Hasil dari penelitian ini berbanding lurus dengan teori mengenai CSR itu sendiri, yaitu suatu konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan sumbangsih untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih atau dapat dikatakan peduli dengan kinerja lingkungannya berarti telah menerapkan CSR dengan sebagaimana mestinya

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat adalah komite audit berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan dewan komisaris berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*, sedangkan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Adapun kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Pertumbuhan Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*.

6. IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan periode pengamatan yang lebih lama dan tahun yang lebih terbaru

2. Penelitian selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan populasi yang berbeda, tidak terbatas pada perusahaan sektor manufaktur saja
3. Penelitian selanjutnya untuk dapat menambah variabel agar dapat mencerminkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility*.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela. 2015. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Kinerja Finansial dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Darwin, Ali 2008. CSR; Standards dan Reporting. Seminar Nasional CSR sebagai kewajiban asasi perusaha; telaah pemerintah, pengusaha, dan Dewan Standar Akuntansi. Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata. Semarang.
- Deegan, Craig. 2000. Financial Accounting Theory. Australia NSW: McGrawHill.
- Effendi, Muh. Arief. 2016. *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta Selatan
- Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Pedoman Umum *Good Corporate Governance*. Jakarta.
- Ghozali, dan Chariri. 2008. Teori Akuntansi. Fakultas Ekonomi: Universitas Diponegoro. Semarang
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro. Semarang
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Mardi, Hermanto, dan Widyastuti. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility*. Jurnal. Universitas Mataram. Nusa Tenggara Barat
- Muntoro, Ronny Kusuma. 2007. Membangun Dewan Komisaris yang Efektif. Usahawan No. 11 Th 2007
- Purba, DIMITA H. P. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan dan Kebijakan Struktur Modal Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Properti, dan real estate di BEI. Journal. Universitas Methodist Indonesia
- Said, Zainuddin, dan Haron. 2009. *The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristic in Malaysian Public Listed Companies*. *Social Responsibility Journal*. Universiti Sains Malaysia

Sari, Ira Heny Ningrum. 2017. Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta

Sugiyono. 2013-2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Alfabeta. Bandung

Sukasih, dan Sugiyanto. 2017. Pengaruh Struktur *Corporate Governance*, dan Kinerja Lingkungan Terhadap *Corporate Social Responsibility*. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta

www.pahlevi.net(diakses pada 26 Oktober 2019)

www.actconsulting.co/apa-itu-good-corporate-governance (diakses pada 26 Oktober 2019)

www.prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-tujuan-prinsip-good.html (diakses pada 26 Oktober 2019)

www.e-akuntansi.com/pertumbuhan-perusahaan/ (diakses pada 26 Oktober 2019)

www.nichonotes.blogspot.com/2018/01/asimetri-informasi.html (diakses pada 23 oktober 2019)

www.firmsstat.blogspot.com/2009/05/komite-audit.html (diakses pada 29 Oktober 2019)

